BAB V

OUTPUT HASIL PENELITIAN

A. Ringkasan Eksekutif

Masalah pencemaran sampah di bantaran Kanal Jongaya, Kota Makassar, masih menjadi tantangan serius dalam upaya menjaga kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Kanal yang semestinya berfungsi sebagai saluran drainase justru mengalami penumpukan sampah rumah tangga, sedimentasi, dan pencemaran yang mengganggu fungsi ekologisnya. Meskipun telah ada Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, implementasinya belum berjalan optimal di lapangan. Penelitian ini menemukan berbagai hambatan, seperti keterbatasan fasilitas pengangkutan, sulitnya akses ke pemukiman padat, rendahnya partisipasi masyarakat, serta lemahnya pengawasan dan relevansi kebijakan dengan kondisi terkini.

Merespons berbagai permasalahan tersebut, disusun beberapa rekomendasi strategis yang bertujuan untuk memperkuat tata kelola pengelolaan sampah di wilayah kanal. Rekomendasi mencakup penyediaan fasilitas pembuangan yang memadai di pesisir kanal, peningkatan edukasi dan kesadaran warga melalui pendekatan komunitas, penerapan sistem zonasi dan pengawasan berbasis wilayah, serta optimalisasi jalur kanal sebagai rute alternatif pengangkutan sampah bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum. Beberapa pendekatan ini telah terbukti efektif di daerah lain, seperti penerapan sistem berbasis komunitas di Kota Kediri yang menunjukkan keberhasilan melalui dukungan infrastruktur dan keterlibatan aktif warga. Dengan pelaksanaan yang terintegrasi, adaptif, dan berbasis kondisi lokal, kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan sistem

pengelolaan sampah yang lebih tertib, partisipatif, dan berkelanjutan di kawasan Kanal Jongaya.

B. Pendahuluan

Masalah pencemaran sampah di Kanal Jongaya, Kota Makassar, terus menjadi tantangan lingkungan yang belum terselesaikan secara optimal. Kanal yang seharusnya berfungsi sebagai sistem drainase utama justru mengalami penurunan kualitas akibat menumpuknya sampah rumah tangga dan sedimentasi yang tinggi. Kondisi ini tidak hanya mengganggu estetika lingkungan, tetapi juga meningkatkan risiko banjir, pencemaran air, dan penurunan kualitas hidup masyarakat di sekitarnya.

Pemerintah Kota Makassar sebenarnya telah memiliki dasar hukum berupa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, yang ditujukan untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang terstruktur dan berkelanjutan. Namun, temuan di lapangan menunjukkan bahwa implementasi perda ini masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti keterbatasan fasilitas pengangkutan, rendahnya kesadaran masyarakat, serta kurangnya pemahaman yang mendalam dari pajabat pelaksana akan kebijakan pengelolaan sampah.

Isu ini menjadi penting untuk segera ditindaklanjuti, mengingat dampaknya yang bersifat langsung terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Selain itu, dengan tingginya populasi di sekitar bantaran kanal, kebijakan yang tidak berjalan optimal akan semakin memperparah kondisi. Oleh karena itu, policy brief ini disusun untuk mengkaji efektivitas implementasi kebijakan yang berlaku serta memberikan alternatif rekomendasi strategis guna memperkuat tata kelola pengelolaan sampah di wilayah Kanal Jongaya.

C. Deskripsi Masalah

Permasalahan utama dalam pengelolaan sampah di Kanal Jongaya terletak pada belum optimalnya implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011. Meskipun regulasi ini secara normatif telah mengatur sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh, mulai dari pengumpulan, pemilahan, hingga pembuangan akhir, namun praktik di lapangan menunjukkan masih banyak celah dalam pelaksanaannya. Beberapa masalah yang ditemukan antara lain:

1. Keterbatasan fasilitas teknis dan aksesibilitas

   Salah satu tantangan teknis paling nyata dalam pengelolaan sampah di kawasan bantaran Kanal Jongaya adalah keterbatasan akses bagi kendaraan pengangkut sampah. Banyak jalan di sekitar kanal yang sempit dan tidak memungkinkan dilalui oleh kendaraan roda empat. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah setempat mengandalkan kendaraan roda tiga seperti viar untuk menjangkau titik-titik pembuangan. Namun, kenyataannya, kendaraan viar ini belum mampu menjangkau seluruh area permukiman, terutama rumah-rumah yang berada di lorong-lorong sempit. Akibatnya, sebagian besar warga memilih menumpuk sampah di tepi kanal atau bahkan membuangnya langsung ke dalam aliran air, yang pada akhirnya memperparah pencemaran dan mempercepat pendangkalan kanal.

2. Rendahnya Kepatuhan dan Kesadaran Masyarakat

   Rendahnya kepatuhan masyarakat menjadi salah satu hambatan utama dalam pengelolaan sampah di kawasan Kanal Jongaya. Meskipun jadwal penjemputan sampah sudah diatur, banyak warga masih membuang sampah di luar waktu yang ditentukan. Bahkan,

ditemukan perilaku membuang sampah langsung ke kanal dari lantai atas rumah. Di sisi lain, upaya pelibatan warga melalui iuran kebersihan atau program bank sampah belum efektif, karena masih banyak warga yang enggan berpartisipasi. Kurangnya kesadaran ini berdampak langsung pada pencemaran lingkungan kanal dan memperberat kerja petugas kebersihan.

3. Tingginya Kepadatan Penduduk di Sekitar Kanal

   Wilayah bantaran Kanal Jongaya dihuni oleh ribuan kepala keluarga yang sebagian besar tinggal di kawasan padat penduduk dengan kondisi permukiman semi-permanen. Tingginya jumlah penduduk ini membuat distribusi informasi kebijakan menjadi tidak merata, serta menyulitkan proses pengawasan dan penegakan aturan di lapangan. Situasi ini memperberat upaya pemerintah dalam memastikan setiap warga memahami dan mematuhi kebijakan pengelolaan sampah yang berlaku.

4. Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya Manusia

   Keterbatasan sumber daya juga menjadi kendala dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kanal Jongaya. Dinas Lingkungan Hidup dan pihak kecamatan mengeluhkan minimnya armada pengangkut serta jumlah petugas kebersihan yang tidak sebanding dengan volume sampah dan luas wilayah layanan. Di sisi lain, upaya edukasi kepada masyarakat belum dilakukan secara masif dan berkelanjutan, sehingga kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik masih rendah di kalangan warga.

Permasalahan-permasalahan ini saling berkaitan dan menyebabkan implementasi kebijakan berjalan tidak efektif. Jika tidak ditangani secara

komprehensif, pencemaran di Kanal Jongaya akan terus berlanjut dan memperburuk kondisi lingkungan di Kota Makassar.

D. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis terhadap implementasi Perda Kota Makassar No. 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah, di kawasan Kanal Jongaya. Berikut beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah Kota Makassar untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah:

1. Penguatan Akses Fasilitas Pembuangan dan Pengangkutan Sampah di Sepanjang Pesisir Kanal

   Pemerintah Kota Makassar perlu menyediakan tempat sampah umum di beberapa titik strategis sepanjang pesisir Kanal Jongaya, khususnya di area permukiman padat yang sulit dijangkau armada pengangkut. Ketersediaan fasilitas ini penting untuk memudahkan warga dalam membuang sampah pada tempatnya, tanpa harus meletakkannya sembarangan di tepi kanal atau menggantung di pagar rumah.

   Dengan adanya titik-titik pembuangan yang terpusat dan mudah diakses, sistem pengelolaan sampah dapat berjalan lebih tertib dan terkontrol. Hal ini juga akan mengurangi beban petugas kebersihan serta meminimalkan potensi sampah tercecer ke aliran kanal. Agar efektif, penyediaan tempat sampah umum ini perlu didukung dengan jadwal pengangkutan yang konsisten, sosialisasi kepada warga, serta pemantauan rutin oleh aparat kelurahan dan kecamatan.

2. Peningkatan edukasi dan partisipasi masyarakat

   Masyarakat perlu diberikan edukasi secara berkelanjutan mengenai cara membuang sampah yang benar, pentingnya mengikuti

jadwal pengangkutan, serta pengelolaan sampah sejak dari rumah tangga. Edukasi ini idealnya dilakukan secara langsung di lingkungan warga melalui pendekatan komunitas yang bersifat partisipatif. Pelibatan tokoh masyarakat, ketua RT/RW, dan pihak sekolah memiliki peran penting dalam menyampaikan pesan kebersihan dengan cara yang lebih mudah diterima. Melalui kegiatan seperti sosialisasi lingkungan, kerja bakti bersama, atau kampanye kebersihan, diharapkan kesadaran kolektif dapat terbentuk dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan kanal.

3. Penerapan Sistem Zonasi dan Pengawasan Berbasis Wilayah

Pemerintah Kota Makassar dapat menetapkan sistem zonasi pengelolaan sampah di sepanjang bantaran Kanal Jongaya yang dibagi per RT atau RW. Setiap zona memiliki jadwal pengangkutan tersendiri, titik kumpul sampah yang resmi, dan petugas pengawas yang bertanggung jawab. Sistem ini dapat diperkuat dengan membentuk Satgas Lingkungan Warga berbasis komunitas yang terdiri dari perwakilan RT, tokoh pemuda, dan warga sekitar.

Setiap zona didorong untuk membuat aturan internal, seperti sanksi sosial ringan bagi pelanggar (misalnya warga yang membuang sampah sembarangan), serta insentif sederhana bagi warga yang taat. Dengan pendekatan ini akan menciptakan rasa tanggung jawab bersama dan kontrol sosial yang lebih efektif dibanding pengawasan dari pemerintah dari kelurahan.

Penerapan pendekatan serupa juga telah dilakukan di Kota Kediri, di mana sistem pengelolaan sampah berbasis komunitas terbukti relevan dan efektif. Berdasarkan hasil penelitian dalam *International Journal of Social Science*, keberhasilan program tersebut sangat

dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur serta tingkat pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa pelibatan warga secara aktif, jika didukung oleh fasilitas yang memadai dan edukasi berkelanjutan, dapat menjadi kunci keberhasilan pengelolaan sampah di tingkat lokal.

4. Optimalisasi Jalur Kanal Sebagai Alur Penjemputan Sampah Berbasis Air

Pemanfaatan jalur air sebagai rute alternatif pengangkutan sampah di Kanal Jongaya menjadi salah satu solusi inovatif yang patut dipertimbangkan. Kondisi permukiman padat dan lorong sempit di sepanjang bantaran kanal telah lama menjadi kendala utama dalam pengangkutan sampah melalui jalur darat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis geografis dengan memanfaatkan kanal sebagai jalur distribusi justru dapat menjadi peluang.

Melalui kerja sama antara Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum, pemerintah dapat mengoperasikan perahu motor atau rakit sampah sederhana yang menjangkau titik-titik pembuangan yang telah ditentukan di sepanjang kanal. Sampah yang dikumpulkan dari warga ditempatkan pada wadah sementara seperti jaring atau tong terapung, kemudian diangkut melalui jalur air menuju tempat pembuangan sementara (TPS) yang lebih besar.

Skema ini tidak hanya dapat mengatasi hambatan fisik yang selama ini memperlambat pengangkutan sampah, tetapi juga menjadi bentuk pendekatan lokal yang sesuai dengan karakteristik lingkungan sekitar. Keberadaan sistem ini diyakini dapat mengurangi kecenderungan warga membuang sampah langsung ke kanal, karena mereka mengetahui bahwa akan ada petugas yang mengambil sampah

secara rutin dari titik tertentu. Jika berhasil, sistem ini juga berpotensi direplikasi di kanal-kanal lain di Kota Makassar yang memiliki tantangan serupa.

E. Daftar Pustaka

Burhan, S., Jinca, M. Y., & Sutopo, Y. K. D. (2021). Kelayakan Kanal Panampu-Jongaya Sebagai Jalur Transportasi Air di Kota Makassar. Jurnal Wilayah & Kota Maritim, 9(2), 112–117. https://doi.org/10.20956/jwkm.v9i2.1189

Bucek. (2022). *Jorok, Kanal Jongaya Butuh Perhatian Pemerintah*. Celebes Media. https://www.celebesmedia.id/celebes/artikel/1025241122/jorok-kanal-jongaya-butuh-perhatian-pemerintah

P. Yenik. (2021). Policy Effectiveness Of Community-Based Waste Management In The City Kediri. International Journal of Social Science (IJSS) Vol.1 No.1